

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang berawal dari kota Wuhan, China, saat ini penyebarannya semakin meluas hingga lebih dari 200 negara, termasuk di Indonesia (Widya, 2020). Di Indonesia sendiri pasien COVID-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 di mana pasien tersebut adalah dua orang warga Depok, Jawa Barat (Hasbi, 2020).

Sejak kasus pertama diumumkan, angka penyebaran COVID-19 semakin meningkat, sehingga hal tersebut mampu mengubah segala aspek kehidupan salah satunya adalah gaya hidup masyarakat di Indonesia (Dianawati, 2020). Perubahan gaya hidup dapat membuat masyarakat memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas. Keterbatasan tersebut dijalankan demi menekan pertumbuhan dan peluang tertular COVID-19, misalnya, tetap jaga jarak, tidak bersentuhan dengan sesama individu, selalu menggunakan masker dan rajin cuci tangan (Soesatyo, 2020). Maka dari itu pemerintah membuat sebuah peraturan yang dikenal dengan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dianggap bisa memutus rantai penyebaran sekaligus mempercepat penanggulangan COVID-19 yang semakin meluas di Indonesia (Damasha, 2020).

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kepada masyarakat melalui konferensi pers mengenai kebijakan yang dibuat

untuk menanggapi COVID-19 yang diputuskan sebagai masa pandemi global, yaitu menerapkan kebijakan PSBB (Ristyawati, 2020). Dengan dianggapnya PSBB menjadi aksi dari adanya Kedaruratan Kesehatan Nasional, pada konferensi pers Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membuat kebijakan sendiri di wilayahnya yang bertentangan dengan protokol dan arahan dari pemerintah pusat, dan apabila tidak memenuhi dan melanggar arahan tersebut akan dikenakan sanksi (Ristyawati, 2020). PSBB adalah istilah kekarantinaan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB yang akan dilakukan selama 14 hari, dan akan diperpanjang bila kondisi wabah meningkat (Dewi, 2020). Beberapa syarat yang harus dipenuhi jika daerah di sebuah wilayah ingin menjalankan PSBB, yaitu penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut mengalami kenaikan dengan cepat didalam kurun waktu tertentu, terjadi transmisi lokal dan kasus kematian akibat COVID-19 bertambah (Herman, 2020).

PSBB pertama kali di terapkan di DKI Jakarta pada tanggal 10 April 2020 yang diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, karena, pertumbuhan COVID-19 yang paling signifikan terjadi di DKI Jakarta (Dewi, 2020). Kebijakan PSBB yang diterapkan di DKI Jakarta adalah meliburkan sekolah, menutup tempat ibadah dan tempat wisata, membatasi kapasitas dari transportasi umum, membatasi kegiatan perkantoran dan seluruh kegiatan yang mengundang kerumunan (Junita, 2020). Inisiasi ini juga dilakukan oleh sejumlah wilayah di sekitar DKI Jakarta yaitu Tangerang dan

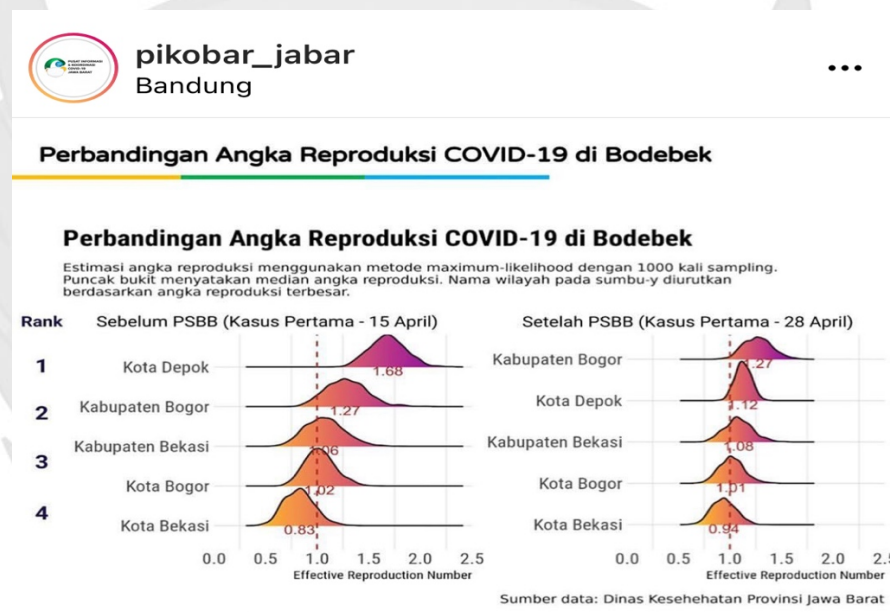
beberapa wilayah di Jawa Barat yang mempunyai akses yang langsung dan mudah ke DKI Jakarta (Dewi, 2020).

Sejumlah wilayah di Jawa Barat, yaitu Bogor, Depok, Bekasi dan dua wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi, mengajukan daerahnya untuk menetapkan PSBB kepada Menkes dalam rapat koordinasi yang diketuai oleh ketua Satgas atau Satuan Tugas COVID-19 Jawa Barat yang juga merupakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Hasbi, 2020). Ridwan Kamil mengatakan, bahwa wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) harus melakukan PSBB, karena mempunyai klaster yang sama dengan DKI Jakarta yang menjadi wilayah penyebaran COVID-19 terbesar (Herman, 2020). Agar peta persebaran COVID-19 selama PSBB optimal, Ridwan Kamil akan berkiblat akan menguji 0,6 persen penduduk Bodebek dengan uji hasil positif COVID-19 (Hermansyah, 2020b).

Pemerintah Daerah (Pemda) telah menerima Surat Keputusan dari Menkes mengenai PSBB pertama kali yang dilakukan di Jawa Barat yaitu di Bodebek pada tanggal 15 April 2020 selama 14 hari kedepan, dan disusul oleh Bandung Raya (Hermansyah, 2020a). Saat PSBB berlaku, sejumlah transportasi umum boleh beroperasi tetapi dengan pembatasan jumlah penumpang (Herman, 2020). Memberikan kebiasaan baru kepada masyarakat tidak mudah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan banyak strategi agar inovasi ini bisa diterima masyarakat (Herman, 2020).

Sepekan setelah diberlakukannya PSBB di Bodebek dan Bandung Raya, angka penularan COVID-19 mulai menurun (Herman, 2020). Persentase penyebaran COVID-19 turun hingga 50%, jumlah pasien COVID-

19 yang dirawat di rumah sebelum adanya PSBB adalah sekitar 430, dan setelah PSBB turun menjadi sekitar 230 pasien (Awal, 2020). Angka keberhasilan yang diumumkan tersebut diukur secara ilmiah dan datanya dapat dipertanggungjawabkan (jabarprov.go.id, 2020).

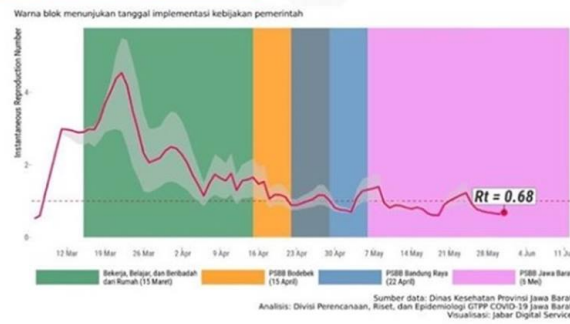


Re : angka reproduksi atau replikasi kasus COVID-19 secara keseluruhan hingga waktu kasus terakhir. Nilainya menunjukkan setiap adanya 1 kasus harian akan memicu berapa kali lipat replikasi kasus di waktu berikutnya.

Gambar 1.1 Data perbandingan kasus COVID-19 sebelum dan sesudah PSBB, PSBB Jawa Barat dinilai berhasil pada PSBB pertama di Bodebek 15-29 April 2020.
Sumber: (Pikobar, 2020)

Indeks dari penyebaran virus (R_0) juga menurun dibawah 1, yang sebelumnya mencapai 3 untuk reproduksi dari penyebaran COVID-19, sekarang turun menjadi 0,68 sehingga kedepannya akan menurun, jika R_0 1, 1 orang hanya menyebarkan ke 1 orang sedangkan jika 3, maka 1 orang menyebarkan ke 3 orang (Nyoman, 2020).

Angka Reproduksi Covid Terhadap Waktu Di Jawa Barat

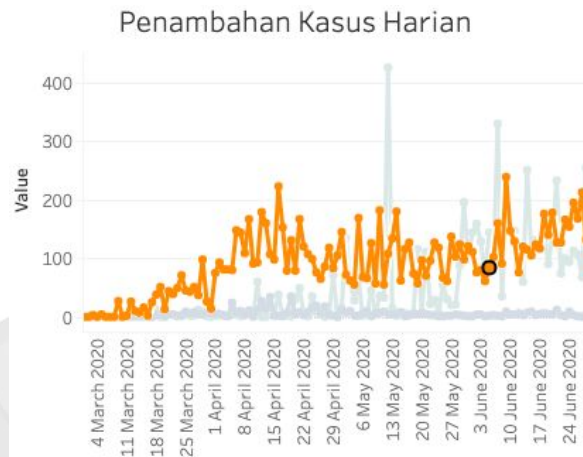


Gambar 1.2 Data angka reproduksi efektif (R_0) COVID-19 di Jawa Barat mengalami penurunan.

Sumber: (Pikobar, 2020).

Keberhasilan yang diraih Provinsi Jawa Barat membuktikan bahwa langkah PSBB adalah strategi yang efektif untuk menekan penyebaran COVID-19, tentu saja keberhasilan ini harus diikuti dengan kontribusi dari masyarakat untuk patuh dan sosialisasi yang baik dari pemerintah (Husaini, 2020). Diluar data keberhasilan yang diraih oleh Jawa Barat, masih banyak daerah lain yang sudah menerapkan PSBB tetapi dengan hasil tidak sesuai dengan harapan, sebagai contoh DKI Jakarta dan Jawa Timur (Sutarno, 2020).

DKI Jakarta memulai PSBB pertama kali lebih awal dari Jawa Barat karena kurva COVID-19 dan penyebarannya dinamis atau berfluktuasi (Darmajati, 2020). Sama halnya dengan Jawa Timur yang memberlakukan PSBB, tetapi kasus hariannya meningkat (Sutarno, 2020).



Gambar 1.3 Kurva baru COVID-19 DKI Jakarta
Sumber (corona.jakarta.go.id, n.d.)

Dalam upaya menertibkan aturan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengimplementasikan PSBB, salah satunya adalah ketepatan dan kecepatan komunikasi dan strategi yang terpusat ke daerah yang akan diberikan sosialisasi (Arif Satriantoro, 2020). Keberhasilan sebuah program yang disosialisasikan kepada masyarakat, selain membutuhkan rencana yang matang dan manajemen yang baik untuk mewujudkan tujuan yang menjadi kepentingan bersama, rencana dan manajemen merupakan komponen dari strategi komunikasi, yang bila dijalankan dengan baik, maka akan terdapat keberhasilan daripada tujuan yang diharapkan (Widodo & Permatasari, 2020).

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui strategi komunikasi dalam sosialisasi PSBB yang dinilai berhasil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan judul “Strategi Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dalam Sosialisasi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan, maka ditentukan rumusan masalah yaitu bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mensosialisasikan PSBB?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Strategi Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mensosialisasikan PSBB yang dinilai berhasil.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi penelitian yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan secara teoritis tentang bagaimana meneliti dan mendeskripsikan Strategi Komunikasi sebuah instansi sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan bagi Provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), mengingat keberhasilan Provinsi Jawa Barat dalam menekan angka penyebaran COVID-19. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan evaluasi bagi lembaga atau instansi pemerintah untuk

membangun strategi komunikasi yang baik dan efektif dan meningkatkan kinerja dengan lebih baik.

